

**Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Gembor Kota Tangerang**

<sup>1</sup> Wike Oktapiani

<sup>1</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia; 1801010010@students.unis.ac.id

*Received: August 13, 2022; In Revised: October 16, 2022; Accepted: November 14, 2022*

**Abstract**

Good governance is something related to actions or behavior that are directing, controlling or influencing public affairs to realize these values in everyday life. The purpose of this study is to determine the process of distributing Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Gembor Village, To determine the effectiveness of the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Gembor Village, To determine the inhibiting factors and factors driving the success of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. To find out how to overcome the inhibiting factors in the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. This study used descriptive qualitative methods and involved informants from the Gembor Village apparatus, BPNT officers and BPNT recipient communities. In this study using the Van Doeveren theory with its five principles, namely (1) Accountability, (2) Effectiveness and efficiency, (3) Openness and Transparency, (4) Participation, (5) rule of law. The results of this study with the five principles of Van Doeveren that have been implemented properly only the principles of Accountability and the principles of Effectiveness and efficiency, while the principles of Openness and Transparency, Participation, the Rule of Law have not been implemented properly

**Keywords:** Governance, Non-cash food assistance (BPNT), Transparency

**Pendahuluan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau sekelompok orang tertentu relative terhadap standar hidup yang biasanya lazim dalam masyarakat yang bersangkutan. Banyak negara menghadapi masalah kemiskinan, terutama bagi negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya (Hasim, 2020). Untuk menanggulangi kemiskinan, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan program Beras Raskin, dan di tahun 2015, program Raskin mengganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), Tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama.

Dalam upaya meningkatkan program subsidi Rastra, pemerintah mengubahnya menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). dimulai sejak tahun 2017, yang secara bertahap disalurkan di 44 Kota di Indonesia. Bantuandari pemerintah yang awalnya sebesar Rp110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadi Rp200.000 per KPM. Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli makanan dari warung elektronik (E-warong), merupakan salah satu pengembangan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program Keluarga Harapan (PKH) atau pedagang makanan lainnya yang telah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI).

Program ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, menjelaskan bahwa “dalam rangka stabilitas perekonomian nasional, peningkatan ketepatan kelompok penerima manfaat, pemberian gizi lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan pengendalian kepada

masyarakat miskin, dengan mendorong perdagangan eceran kepada penduduk, serta memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin, kemiskinan dan rasionalisasi anggaran, dipandang perlu untuk pelaksanaan agenda reformasi Rastra”.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini disalurkan dalam bentuk tunai. Atas arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kementerian Sosial bahwa penyaluran BPNT kini dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk promosi. Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 28 yaitu “penyaluran dana bantuan program sembako di wilayah dengan mekanisme alternative, bantuan program sembako diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui pos penyalur “. Menteri sosial mengakui menerima banyak aduan dari masyarakat penerima bantuan yang menerima sembako dengan kualitas kurang baik. Namun juga mekanisme di lapangan yang tidak memihak penerima manfaat.

Kelurahan Gembor yang berada di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten memiliki 15 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun Warga (RW). Dan tercatat pada tahun 2019 sampai 2021 ada sekitar 451 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor terdapat sejumlah agen penyaluran bantuan atau yang biasa disebut E-warong yang berlokasi di Posyandu RW 07 dan bekerja sama dengan Bank BNI untuk proses penyaluran uang untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu: (1) Bersatus WNI (Warga Negara Indonesia), (2) Termasuk ke dalam golongan keluarga miskin atau rentan miskin, (3) Kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana, (4) Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, (5) Warga terdampak covid-19 atau kehilangan mata pencaharian karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya perincian jumlah penerima bantuan yang berada di Kelurahan Gembor adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Gembor Tahun 2019-2021**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Penerima BPNT	Persentase
1.	2019	517 KK	172 KK	33%
2.	2020	490 KK	145 KK	29 %
3.	2021	479 KK	134 KK	27 %

Sumber: Data Kelurahan Gembor (2021)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 172 Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah penerima BPNT setiap tahunnya mengalami penurunan karena sudah dianggap mandiri secara ekonomi, serta beberapa anggota keluarganya sudah ada yang bekerja ini berdasarkan data survey di lapangan secara visual. Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor ini tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa permasalahan, seperti: (1) Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan berdasarkan fakta Masih ada beberapa penerima BPNT dengan kondisi ekonomi yang sangat baik, meskipun ada banyak orang lain yang lebih layak dari pada menerima.

Berdasarkan hasil observasi kepada Ketua PSM RW.02 bahwa masih ada masyarakat yang seharusnya menerima BPNT. Bisa jadi dengan NIK KTP yang tidak diperbarui sehingga masyarakat tersebut tidak terdaftar di BPNT, (2) Kurangnya sosialisasi petugas Kelurahan dan PSM ke KPM terhadap program BPNT. Berdasarkan hasil observasi peneliti belum adanya sosialisasi dari pihak kelurahan ke masyarakat mengenai program BPNT. Dan tidak adanya jadwal sosialisasi untuk masyarakat, (3) Masih belum transparannya petugas Kelurahan dalam data penerima BPNT ke masyarakat. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa masyarakat

hanya tahu bahwa ia menerima BPNT melalui PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dari masing-masing RW. Dan data penerima tersebut tidak diumumkan secara terbuka di Kelurahan.

Tata kelola yang baik (*Good Government*) menurut (Van Doeveren, 2011) mendefinisikan Tata Kelola yang baik mengacu pada strategi kebijakan di mana penyaluran bantuan menggabungkan manajemen publik baru dengan advokasi demokrasi liberal dalam menekankan nilai-nilai politik, administrasi, dan ekonomi dari legitimasi dan efisiensi. Prinsip-Prinsip *Good Governemnt* Menurut (Van Doeveren, 2011) terdapat prinsip-prinsip *good government*, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, Akuntabilitas menyiratkan bahwa semua manajer di sektor publik “bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas tertentu dan untuk mematuhi aturan dan standar yang berlaku untuk posisi mereka.
2. Efektivitas dan Efisiensi, Efisiensi sebagai sejauh mana tujuan kinerja yang dinyatakan sebelumnya tercapai.
3. Keterbukaan dan Transparansi, Transparansi mengacu pada lingkungan dimana tujuan kebijakan, kerangka hukum, kelembagaan dan ekonomi, keputusan politik dan alasannya, data dan informasi yang terkait dengan kebijakan moneter dan keuangan, dan persyaratan kelembagaan tersedia untuk publik dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat di akses. dan sesuai. tata krama. waktu.
4. Partisipasi, Partisipasi didasarkan pada persepsi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak peserta dalam jaringan.
5. Aturan Hukum, Tata pemerintahan yang baik membutuhkan penegakan hukum dan sistem peradilan (polisi dan pengadilan) yang independen dan bebas dari korupsi untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

### Metode Penelitian

Pendekatan Kualitatif, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena peneliti ingin memahami bagaimana governance bekerja dalam penyampaian program BPNT di Kelurahan Gembor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dikembalikan dalam bentuk laporan tertulis atau deskriptif. Penelitian kualitatif ini banyak dipengaruhi oleh pendapat, pemikiran dan pengetahuan peneliti sebagai data yang diinterpretasikan oleh peneliti (Nugrahani, 2014). Jenis Penelitian Metode Deskriptif, Peneliti menekankan catatan dengan uraian kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif umumnya disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menganalisis data dalam nuansa yang berbeda tergantung pada bentuk aslinya seperti saat direkam atau dikumpulkan (Nugrahani, 2014).

Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini menggunakan Teknik pertama Wawancara peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan tetapi juga belajar tentang pengalaman hidup orang lain. Dengan wawancara mendalam, peneliti menangkap makna yang dibuat informan dari pengalamannya. (Raco, 2018). Kedua menggunakan Observasi, Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Observasi nonpartisipan adalah metode observasi dimana peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun langsung melaksanakan aktivitas seperti yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, baik itu kehadiran peneliti yang diketahui maupun tidak diketahui (Raco, 2018). Dan ketiga yaitu Dokumentasi, Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan penelitian.

Teknik Analisis Data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah data selesai. dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (Raco, 2018). Saat menganalisis di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman berasumsi bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif.

### Hasil dan Pembahasan

Gembor adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten. Kelurahan ini terdiri atas 15 RT dan 13 RW. Kelurahan ini memiliki luas 2,13 (Km<sup>2</sup>) menurut data Kelurahan Gembor tahun 2021, jumlah penduduknya sekitar 31.383 jiwa. Ditinjau dari geografis Kelurahan Gembor berada pada Kecamatan Periuk wilayah barat Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kelurahan Gembor mulai dari tahun 2019-2021. Data ini terlihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.**

**Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Gembor Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Penduduk Miskin
1	2019	517
2	2020	490
3	2021	479
<b>Jumlah</b>		<b>1.486</b>

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gembor Tahun (2021)

### Hasil dan Pembahasan

Proses Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada prinsip (1) Partisipasi, menurut (Van Doeveren, 2011) didasarkan pada persepsi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor dalam pengaturan jaringan. Dan semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Berdasarkan Pedoman Umum BPNT 2018 bahwa sosialisasi program BPNT dirancang untuk memberikan informasi dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, akademisi, termasuk peserta KPM BPNT. Namun hasil wawancara peneliti masih ada KPM yang belum pernah ikut sosialisasi. Dan dalam pendataan sasaran dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah masyarakat dengan kondisi sosioekonomi 25% terendah di setiap daerah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pendataan yang dilakukan pihak BPNT tidak semaksimal mungkin dan tidak melihat kondisi masyarakat setempat yang berhak menerima dan tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya penerapan partisipasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. (2) Keterbukaan dan Transparansi, mengacu pada lingkungan dimana tujuan kebijakan, kerangka hukum, data dan informasi yang terkait dengan kebijakan moneter dan keuangan, diberikan kepada publik dengan cara yang dapat dipahami, dapat diakses, dan tepat waktu. dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yg akurat. Prinsip keterbukaan dan transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh PSM mengenai jadwal penyaluran hanya disampaikan melalui grup whatsapp saja, hal itu menjadi kendal bagi KPM yang tidak memiliki alat komunikasi, sebaiknya pihak PSM memberikan informasi ke KPM secara langsung agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.

Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada prinsip (1) Efektivitas dan Efisien, Menurut (Van Doeveren, 2011) efektivitas dan efisien sebagai sejauh mana tujuan yang dinyatakan sebelumnya dari suatu kegiatan telah terpenuhi. Prinsip dari efektivitas ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan. Maka penerapan prinsip efektivitas di Kelurahan Gembor sudah diterapkan dengan baik. (2) Akuntabilitas, Menurut (Van Doeveren, 2011) akuntabilitas menyiratkan bahwa semua manajer di sektor publik “bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian tugas yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan standar yang berlaku untuk jabatan mereka. Dari hasil penelitian bahwa Tata Kelola dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik dimana TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) langsung menyampaikan pertanggung jawabannya ke Dinas Sosial melalui via online.

Faktor Penghambat dan Pendorong Program BPNT pada prinsip (1) Aturan Hukum, menurut (Van Doeveren, 2011) yaitu tata pemerintahan yang baik membutuhkan penegakan hukum dan system peradilan (kepolisian dan pengadilan) yang independen dan tidak korupsi, sehingga dapat menjamin penegakan hukum secara adil bagi masyarakat. Tata kelola dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Kelurahan Gembor yaitu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hanya datang ke e-warong dengan membawa kartu ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ke lokasi untuk mencairkan dengan sembako dan ada beberapa KPM yang dipungut biaya oleh PSM sebesar Rp.5.000 sampai Rp.10.000.

Dari hasil penelitian bahwa prinsip aturan hukum belum diterapkan dengan baik dimana terdapat masalah yang dijelaskan oleh beberapa informan mengenai pungutan biaya pada saat penyaluran padahal dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pasal 21 yaitu “Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya”. Jadi prinsip aturan hukum di Kelurahan Gembor dalam penyaluran BPNT tidak menjamin penegakan hukum secara adil bagi masyarakat. (2) Faktor Pendorong, Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor terdapat faktor pendorong dalam pelaksanaan penyaluran yaitu dari cara kerja e-warong yang sangat cepat dan gesit menjadi faktor pendorong kelancaran penyaluran dan pengawasan dari pihak tertentu yang membuat pelaksanaan penyaluran berjalan dengan baik.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan tentang Tata Kelola Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gembor dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima prinsip-prinsip *Good Government* menurut (Van Doeveren, 2011) (1) Prinsip Partisipasi dalam proses penyaluran di Kelurahan Gembor belum terlaksana dengan baik karena dari pemerintah desa masih kurangnya sosialisasi dalam program ini jadi masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dalam pendataan penerima BPNT tidak tepat sasaran, (2) Prinsip Keterbukaan dan Transparansi, prinsip keterbukaan dan transparansi di Kelurahan Gembor belum dilaksanakan dengan baik dimana dalam memberikan informasi hanya melalui grup whatsapp dan itu menjadi kendala bagi KPM yang tidak memiliki alat komunikasi. Dan dalam proses penyalurannya ada beberapa PSM yang meminta mengumpulkan kartu ATM padahal seharusnya dalam pedoman BPNT KPM itu sendiri yang harus menggesek kartu ATM di e-warong, jadi masih ada masyarakat belum memperoleh informasi yang akurat, (3) Efektivitas dan efisien, prinsip efektivitas dan efisien sudah dilaksanakan dengan baik, dimana manfaat dan kualitas dalam bantuan ini sangat di rasakan oleh masyarakat dan dalam kualitas bantuan tersebut cukup layak untuk di konsumsi oleh masyarakat,

(4) Akuntabilitas, prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik, dimana TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan petugas penyaluran sudah bertanggung jawab dan melaporkan pertanggung jawabannya langsung ke Dinas Sosial melalui via online, (5) Aturan Hukum, prinsip aturan hukum belum dilaksanakan dengan baik karna adanya pungutan biaya yang tidak didasarkan pada aturan hukum dan kebijakan yang jelas.

## Referensi

- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Arisaputra, M.I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Duarmas, D., Rumapea, P., Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>
- Djumadi., Putra, P. P., Masruroh, Y. R., Syamsinar, Cahyawan, R., Jailani, A. K. (2018). Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan di Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 35–44.
- Enceng, L.B., Purwaningdyah, M. (2008). Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 2, 33–43.
- Hardani., Ustiawaty, J., Andriani, H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Guna Meningkatkan Kesejahteraan. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
- Ismayanti. (2021). *Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. 6.
- Laloma, A., & Plangitan, N. (2018). Tatakelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(54), 3.
- Mahyuddin, T.F. (2013). Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Meranti, D. I. K. (2015). *Penepenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. II*, 1–15.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 303–309. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>

- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Sujana, E. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–11.
- Sasundame, R. G., Tulus, F., & Kalangi, J. (2018). Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Pembuatan E ± Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Unsrat*, 1–18.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. (2021). Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai. *Kemensos.Go.Id*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>
- Sulfiani, A.N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Arifianto, A. (2004). Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. *Kertas Kerja SMERU*, 44.
- Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik
- Van Doeveren, V. (2011). Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31>